



**RISALAH RAPAT KOMISI IV DPR-RI
BIDANG PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN,
SERTA PERUM BULOG**

Tahun Sidang	:	2019-2020
Masa Persidangan	:	1 (Satu)
Rapat ke-	:	
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja
Sifat Rapat	:	Tertutup – Terbuka
Dengan	:	Menteri Kelautan dan Perikanan RI
Hari, Tanggal	:	Senin, 16 September 2019
Waktu	:	17.00 WIB s/d Selesai
Acara	:	Penyesuaian RKA K/L Tahun Anggaran 2020 sesuai hasil Pembahasan Badan Anggaran.
Ketua Rapat	:	Edhy Prabowo, MM, MBA
Sekretaris Rapat	:	Drs. Budi Kuntaryo
Hadir	:	27 dari 47 anggota
Hadir Mitra Kerja	:	Menteri Kelautan dan Perikanan RI

ANGGOTA KOMISI IV DPR-RI:

1. EDHY PRABOWO, MM, MBA
2. VIVA YOGA MAULADI, M.Si
3. DANIEL JOHAN
4. SUDIN
5. Drs. I MADE URIP, M.Si.
6. Ir. MINDO SIANIPAR
7. ONO SURONO, S.T.
8. Ir. EFFENDI SIANIPAR
9. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, SS
10. RAHMAT HANDOYO, S.PI, MM
11. ROBERT JOPPY KARDINAL, S.AB
12. A.A BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA
13. H. M. SALIM FAKHRY, SE, MM.
14. Ir. H. EDDY KUNTADI
15. Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.
16. G. BUDISATRIO DJIWANDONO
17. Dr. FELICITAS TALLULEMBANG
18. IR. H. MUHAMMAD NASYIT UMAR, SP
19. EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos
20. M. IRWAN ZULFIKAR, MBA.

21. Drs. IBNU MULTAZAM
22. H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, S,Ag
23. Dr. HERMANTO, S.E., M.M
24. Hj. KASRIAH
25. H. ASEP AHMAD MOUSHUL AFFANDY
26. Drs. HASANUDDIN, AS, M.Si.
27. SULAEMAN L. HAMZAH

ANGGOTA YANG IJIN :

1. Drs. H. ROEM KONO
2. DR. MICHAEL WATTIMENA, SE., MM.
3. RIDWAN ANDI WITTIRI
4. Ir. TAGORE ABUBAKAR
5. DJENRI ALTING KENTJEM, S.H., M.H.
6. H. AGUNG WIDYANTORO, S.H., H.H.
7. ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, S.H.,M.H.
8. Drs. WENNY WAROUW
9. Ir. ENDRO HERMONO, MBA
10. Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si.
11. VIVI SUMANTRI JAYABAYA, S.Sos.
12. Drs. UMAR ARSAL
13. Dr. Drs. YUS SUDARSO, S.H., M.H.
14. H. ACEP ADANG RUHIAT, M.Si.
15. Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, SP., M.M.
16. Drs. H. MAHFUZ SIDIK, M.Si.
17. Drs. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI, M.Si.
18. Drs. FADHOLI
19. Drs. MUCHTAR LUTHFI A.MUTTY, M.Si.
20. Dr. ERISLAN, S.T., M.M.

KETUA RAPAT (EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.):

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua

Om swastyastu, namo buddhaya

Yang terhormat Pimpinan dan anggota Komisi IV DPR

Yang terhormat Saudari Menteri Kelautan dan Perikanan beserta

jajarannya

Yang terhormat Saudara para Direktur Utama BUMN di bidang

Kementerian Kelautan dan Perikanan dari Perum Perindo, PT Perinus

serta hadirin yang kami hormati

Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat mengadakan rapat dalam keadaan sehat wal'afiat guna menjalankan salah satu fungsi DPR RI yaitu fungsi anggaran.

Sesuai dengan jadwal acara rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2019-2020 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi tanggal 23 Juli 2019 dan surat Pimpinan Badan Anggaran Nomor AG/113585/DPR RI/VII/2019 perihal Penyampaian rancangan jadwal Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2020 pada hari ini Senin, 16 September 2019, Komisi IV DPR RI menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai penyesuaian RKA K/L Tahun 2020 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran.

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi IV DPR RI saat ini Rapat Kerja Komisi IV DPR RI telah dihadiri dan ditandatangani oleh 31 dari 47 anggota dan 9 dari 10 fraksi sesuai dengan ketentuan pasal 246 dan pasal 251 ayat 1 Peraturan Tatib DPR RI, rapat ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 17.10)

Sesuai undangan Rapat Kerja hari ini harusnya dimulai pukul 15.00 karena tadi ada acara agenda Paripurna sehingga baru bisa kita mulai pukul 17.00 dan mudah-mudahan bisa kita akhiri sebelum magrib karena agenda yang seyogyanya pukul 15.00 sampai 17.00. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Tatib DPR RI pasal 226 ayat 1 dan atau sesuai kesepakatan bersama dengan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat

2. Penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai penyesuaian RKA K/L tahun 2020 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran
3. Tanggapan anggota Komisi IV DPR RI
4. Jawaban Menteri atas tanggapan anggota Komisi IV DPR
5. Kesimpulan atau keputusan
6. Penutup

Apakah acara tersebut dapat kita setujui?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak Ibu yang kami hormati

Berdasarkan surat Pimpinan Badan Anggaran Nomor: AG/15093/DPR RI/IX/2019 tanggal 10 September 2019 perihal penyampaian hasil pembahasan RUU APBN 2020 bahwa hasil penyempurnaan RKA K/L atau rincian per program disampaikan ke Badan Anggaran sebagai bahan penetapan paling lambat tanggal 16 September 2019 dan sesuai surat Pimpinan Badan Anggaran tersebut terdapat perubahan pengurangan pada pendapatan negara, perubahan atau pengurangan pada Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebesar Rp 24.091.790.000 dari sebelumnya sebesar Rp 64.178.751.000 menjadi sebesar Rp 20.086.961.000 sehingga total PNBP menjadi Rp 112.141.827.000. Pengurangan tersebut menjadikan pagu total alokasi anggaran belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020 berubah dari semula sebesar 6 miliar, mohon maaf Rp 6.472.753.539.000 menjadi sebesar Rp 6.400.. mohon maaf Rp 6.448.661.749.000.

Untuk itu pada rapat hari ini Komisi IV DPR RI ingin mendapatkan penjelasan dari Saudari Menteri Kelautan dan Perikanan perihal perubahan dan juga penjelasan mengenai program dan kegiatan prioritas. Harapannya penggunaan alokasi anggaran tahun 2020 dapat sejalan dengan arah pembangunan rencana kerja Pemerintah yang mengedepankan pada 5 prioritas yaitu:

1. pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
2. infrastruktur dan pemerataan wilayah;
3. nilai tambah sektor riil;
4. industrialisasi dan kesempatan kerja;
5. ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup serta stabilitas pertahanan dan keamanan

sehingga sasaran kesejahteraan dan kemakmuran bagi pelaku utama kelautan perikanan di seluruh Indonesia dapat tercapai dan terwujud sesuai harapan kita bersama.

Demikian pengantar Rapat Kerja hari ini. Selanjutnya sesuai dengan acara yang telah kita sepakati, kami persilakan kepada Saudari Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan penjelasannya. Kami persilakan.

MENTERI KKP (Dr. (HC) SUSI PUDJIASTUTI):

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua

**Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi IV DPR RI
Pejabat Eselon I beserta seluruh jajaran Kementerian Kelautan dan
Perikanan**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua sehingga pada siang ini kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir dan melaksanakan Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI membahas penyesuaian rencana kerja anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020 sesuai pembahasan Badan Anggaran.

Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati

Sasaran utama pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020, pertumbuhan PDB perikanan sebesar 7,9% didukung dengan peningkatan produksi perikanan sebesar 26,43 juta ton, produksi garam nasional 3 juta ton, nilai tukar nelayan sebesar 115, tingkat konsumsi ikan 56,39 kilogram per kapita, nilai ekspor hasil perikanan sebesar 5,98 miliar dan jumlah kawasan konservasi perairan menjadi 22,27 juta hektar.

Berdasar surat Menkeu Nomor: S669/MK.02/2019 11 September 2019 perihal penyampaian pagu alokasi anggaran kementerian/lembaga tahun anggaran 2020 hasil Rapat Pembahasan Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat dalam rangka pembicaraan tingkat I/pembahasan Rencana Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2020. Saya sampaikan adanya perubahan pagu alokasi anggaran KKP tahun 2020 dari 6,47 triliun menjadi 6,45 triliun.

Perubahan pagu alokasi anggaran 2020 dari 6,47 menjadi 6,45 yaitu adanya pengurangan pagu penggunaan PNPB sebesar 24,1 miliar sehingga komposisi anggaran per unit eselon I yaitu:

1. DJPT sebesar 702,46
2. Dirjen Budidaya sebesar 739,57
3. Dirjen Penguatan Daya Saing sebesar 366,02 miliar
4. Dirjen Pengelolaan Ruang Laut sebesar 507,85 miliar
5. Dirjen Pengawasan SDKP sebesar 106 triliun
6. Badan Riset SDM KP sebesar 1, 87 triliun
7. Badan Karantina Ikan sebesar 601,08 miliar
8. Inspektorat Jenderal sebesar 85,27 miliar
9. Sekretariat Jenderal sebesar 515,62 miliar

Selanjutnya pagu anggaran akan digunakan untuk rancangan kegiatan prioritas sebagai berikut:

1. DJPT diperuntukkan untuk antara lain: bantuan kapal, alat penangkapan, asuransi nelayan, rehab pelabuhan perikanan, fasilitasi penataan kampung nelayan percontohan, fasilitasi sertifikat hak atas tanah nelayan, implementasi integrasi sistem perizinan, fasilitas kredit, diversifikasi usaha keluarga nelayan, sertifikasi awak kapal, penerapan perjanjian kerja laut, penambahan syahbandar perikanan, observer kapal perikanan, *e-logbook*, partisipasi regional *fisheries management*, operasional lembaga pengelolaan sumber daya ikan di WPPNR, peningkatan layanan pelabuhan perikanan, dan operasional SKPT Natuna, Saumlaki, Merauke, dan Sebatik.
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya untuk antara lain: bantuan sarana prasarana percontohan budidaya, bantuan benih, calon induk, bibit rumput laut, pembangunan rehab sarpras unit pembenihan, *hatchery* skala rumah tangga, pengujian sampel uji lab kesehatan ikan dan lingkungan, pengujian residu produk perikanan budidaya, sertifikasi ekspor, sarpras UPT, pencontohan pengelolaan *cluster* budidaya berkelanjutan, pakan ikan mandiri produksi UPT, asuransi usaha budidaya serta operasional SKPT di Rote Ndao, Sumba Timur dan Sabang.
3. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan diperuntukkan antara lain: sarana pengolahan, kendaraan pendingin, *chest freezer*, *ice flake machine*, gudang beku, promosi gemar makan ikan, promosi pemasaran internasional dan dalam negeri, sarana pemasaran roda 2 roda 3, pembangunan pasar ikan bersih, sentra kuliner, bimbingan pengelolaan percontohan pasar ikan bersih, layanan dan bimbingan sertifikasi kelayakan pengolahan, pembangunan rehab unit pengelolaan ikan, bantuan perlengkapan pedagang ikan, *marine and fisheries business and investment forum* serta lanjutan pembangunan SKPT Biak dan Mimika.

4. Program pengelolaan program laut untuk pembangunan sarana pesisir dan pulau-pulau kecil, pra-sertifikasi pulau terluar, pembangunan pusat restorasi dan pengembangan ekosistem pesisir, rehabilitasi ekosistem pesisir, *hybrid engineering*, gerakan cinta laut, penanganan sampah di pesisir dan pulau kecil, pengembangan kawasan pesisir terpadu, penanaman vegetasi pantai, penyadaran mitigasi bencana dan adaptasi iklim, pemetaan dan pembentukan kelembagaan masyarakat hukum adat, usaha garam rakyat, wisata bahari dan BMKT, pencadangan kawasan konservasi perairan dan jenis, pengelolaan kawasan konservasi, bantuan untuk kelompok penggerak konservasi, rencana zonasi KSN/KSNT, peraturan laut antar wilayah dan provinsi serta operasional SKPT Morotai, Talaud, Mentawai, dan Moa.
5. Program pembangunan sumber daya kelautan dan perikanan antara lain: operasional kapal pengawas, pesawat patroli, *destructive fishing*, konservasi kapal perikanan kepatuhan, sistem pemantauan SDKP, operasional *speed boat*, RIB *rubber boat*, operasional satgas 115, perawatan kapal pengawas, pembangunan kapal pengawas, pembangunan *speed boat* pengawas, pembangunan pos pengawasan, serta operasional dan pembinaan POKMASWAS.
6. Program riset dan sumber daya manusia kelautan perikanan diperuntukkan antara lain: pendidikan vokasi, beasiswa aparatur, pelatihan masyarakat, pelatihan aparatur, pelatihan masyarakat, pelatihan aparatur, sertifikasi kompetensi penyuluhan operasional tenaga penyuluh perikanan, fasilitas legalitas usaha bagi pelaku usaha, penerapan Iptek, riset SDM, kajian stok penambah daya ikan dan perairan umum daratan, kajian rekomendasi kelautan perikanan, riset modal pembangunan kelautan perikanan, inovasi teknologi, riset alat dan mesin kelautan perikanan, riset ikan unggul, vaksin dan prebiotik, penyediaan data informasi hasil riset, pembangunan sarpras pendidikan, pelatihan, penyuluhan, sarana riset, pengadaan sarana riset, data satelit radar.
7. Program karantina ikan, pengendalian mutu dan pengamanan hasil perikanan antara lain: penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan, operasional pengawasan ekspor impor dan domestik, pengawasan mutu hasil perikanan domestik, operasional pengawasan mutu hasil produk perikanan, sarana dan prasarana pengujian mutu, laboratorium acuan hama penyakit ikan karantina, mutu keamanan hasil perikanan, akreditasi lembaga penguji, inspeksi dan pelayanan; pencegahan pengawasan ekspor impor antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi, dan dibatasi; pengendalian pengawasan spesies

berbahaya, serta sarana prasarana pengawasan karantina dan mutu hasil perikanan.

8. Program pengawasan dan peningkatan program akuntabilitas aparatur KKP antara lain: pengawasan *accountability*, pengawasan kegiatan prioritas KKP, pengawasan tujuan tertentu investigasi, penerapan budaya integritas, sinergi pengawasan pihak eksternal, perencanaan program kerja pengawasan dan evaluasi kinerja pengawasan, pengembangan peningkatan SDM pengawasan, analisis tindak lanjut dan data hasil pengawasan, pengelolaan keuangan dan sarana pengawasan, pengawasan atas PBJ dan penambahan cakupan lokasi pengawasan, pengawasan atas kualitas laporan keuangan KKP, pengawasan implementasi RB KKP, pelaksanaan *survey* integritas KKP
9. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, diperuntukkan antara lain untuk penyiapan produk hukum, penataan organisasi, pengelolaan SDM, aparatur pengelolaan keuangan perencanaan penganggaran kinerja kerja sama antar lembaga, pengelolaan administrasi dan PBJ, pengelolaan hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri, pengelolaan data statistik dan informasi, serta operasional BLU LPMUKP.

Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati.

Menindaklanjuti Raker tanggal 9 September 2019 yang lalu kami telah menginstruksikan seluruh jajaran Eselon I untuk berkomunikasi terkait dengan penyaluran bantuan Pemerintah. Kami mendapat laporan bahwa hal tersebut telah ditindaklanjuti pada pertemuan 13 September 2019 di Kantor KKP.

Bapak Ketua, dan Wakil Ketua, para anggota Komisi IV yang saya hormati

Demikian pengantar yang dapat kami sampaikan pada Rapat Dengar Pendapat kali ini, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Komisi IV DPR RI yang sangat besar kepada KKP dan mohon persetujuan lebih lanjut terhadap rancangan RKA K/L KKP tahun 2020. Seluruh saran, masukan, rekomendasi dari Komisi IV DPR RI akan menjadi bahan acuan untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Terima kasih, *Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh*

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam

Bapak Ibu sekalian demikian penjelasan dari Pemerintah, mungkin ada pendalaman dari teman-teman? Kalau tidak ada bisa saya simpulkan. Kita bisa simpulkan secara prinsip Ibu Menteri sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat dalam kemarin tentang di Raker maupun sebelumnya di RDPU dan RDPU kedua., sehingga sudah di respon dengan baik. Saya pikir kenapa kita harus lama-lama rapat kalau rapat yang cepat juga bisa menghasilkan kualitas yang tidak berbeda. Tolong kesimpulannya disampaikan

F- P NASDEM (H. SULAEMAN L. HAMZAH):

Pak Ketua, sedikit

KETUA RAPAT:

Oh ya, silakan Pak Sulaeman, ya ini penting. Ini Pak Sulaeman ini penting dari Dapil Papua Bu, jadi jangan sampai Papua goyang. Jadi beliau kita jadikan ujung tombak.

F- P NASDEM (H. SULAEMAN L. HAMZAH):

Terima kasih Pimpinan dan kawan-kawan anggota. Bu Menteri dan seluruh jajaran.

Pertama, terima kasih untuk usulan yang kemarin yang sudah disampaikan melalui TA. Kemudian terkait dengan bantuan bibit, satu juta bibit yang untuk di danau mau ditebar di danau, itu juga kemarin sudah disampaikan ke TA. Terima kasih untuk itu. Tempo hari tertunda karena bencana di danau itu.

Kemudian yang kedua terkait dengan pertemuan dengan Pak Bupati Mappi. Kebetulan beliau juga mampir ke saya karena tahu bahwa saya ada di Komisi IV sehingga usulan yang sempat disampaikan ke Bu Menteri juga disampaikan kepada saya. Dan untuk itu secara resmi saya ingin serahkan Bu Menteri untuk bisa ditindaklanjuti. Terima kasih Pimpinan, saya serahkan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

Baik terima kasih Pak Sulaeman Hamzah saya pikir bukan di Papua saja, di danau di bantu ikannya. Di Manado, Sulawesi Utara di Gorontalo juga. Tapi kalau bisa Pak yang danau yang ada eceng gondok sama kiambangnya itu yang tanaman itu Bapak kasih bantuan ikan Gurame Pak karena itu makanannya mereka sehingga *gak* jadi wabah. Eceng gondok dan itu Bu dimakan sama Gurame. Saya pernah melakukan itu, jadi itu boleh di uji, di tes saja dulu. Oh terkendali Bu, *cuman* dimakan saja karena.

MENTERI KKP (Dr. (HC) SUSI PUDJIASTUTI):

Grass crap yang tadi *disaranin* itu setahu saya itu invasi Pak ikannya jadi ikan aslinya habis nanti Pak.

KETUA RAPAT:

Eenggak, ini Gurame.

MENTERI KKP (Dr. (HC) SUSI PUDJIASTUTI):

Namanya Grass Crap itu Pak. Itu punya persoalan, mereka tuh gampang sekali mendominasi jadi..

KETUA RAPAT:

Gurame maksud Ibu?

MENTERI KKP (Dr. (HC) SUSI PUDJIASTUTI):

Iya Pak. Kalau kita kasih itu ikan-ikan asli endemik disitu habis Pak. Iya

KETUA RAPAT:

Saya baru tahu kalau Gurame makan ikan juga. Sekian lama saya makan Gurame *gak* tahu dia ternyata predator juga ya?

MENTERI KKP (Dr. (HC) SUSI PUDJIASTUTI):

Herbivor Pak tapi ya ikan lain habis biasanya Pak, kalah tumbuh Pak

KETUA RAPAT:

Ya sudah kalau memang sudah penelitiannya *gitu* silakan saja yang ahlinya

MENTERI KKP (Dr. (HC) SUSI PUDJIASTUTI):

Nanti saya di kritik ahli lingkungan saya Pak, saya merusak lingkungan katanya Pak.

KETUA RAPAT:

Masalahnya dulu pernah kita kunjungan ke tempatnya Pak.

MENTERI KKP (Dr. (HC) SUSI PUDJIASTUTI):

Mungkin bebek Pak, ternak bebek itu paling bagus.

KETUA RAPAT:

Bukan, Tempatnya Pak Mindo dulu Pak, dimana kita Pak? yang di yang danau apa namanya, danau Tondano. Kan danau Tondano mereka punya masalah utama eceng gondok yang sangat massif dan beberapa di danau lainnya yang kita temukan juga *massif* eceng gondok. Daripada di masif mekanisasi mesin ongkosnya mahal mungkin ini dikasih, kan sebenarnya bisa dikendalikan juga. Kalau kita *panenin* juga kan bisa hilang atau dibikin apa namanya itu, sekat jaring-jaring begitu juga kan bisa. *Gak* ini, saya *gak* tahu saya bukan ahli ikan karena saya di Komisi IV jadi bisa menyampaikan. Yang ahlinya silakan diputuskan.

F- P GOLKAR (H.M. SALIM FAKHRY, SE, MM):

Sedikit Pak, semenit saja, semenit.

KETUA RAPAT:

Ya, Pak Salim Fakhry silakan.

F- P GOLKAR (H.M. SALIM FAKHRY, SE, MM):

Terima kasih Pak.

Pimpinan yang kami hormati, Ibu Menteri dan jajarannya

Gak pantas Pak Papua sudah berbicara, Aceh tidak berbicara Pak sebab Papua dan Aceh ini Pak senasib Pak. Kita doakan Saudara kita di Papua ini supaya bisa damai seperti seperti Aceh yang cinta NKRI. Baik Pak Ketua, Bu masalah bantuan Bu Menteri. Saya kira kalau Papua pun Ibu cukup bijaksana itu Bu. Kami tidak banyak dari Aceh Bu, ini khusus di kampung Pak Mindo Bu, kampung beliau nih Aceh Tenggara Bu. Pak Mindo Sianipar asli orang Aceh Bu. Betul Ketua, Pak Mindo keluarga di Aceh.

KETUA RAPAT:

Tapi beliau geleng-geleng Pak.

F- P GOLKAR (H.M. SALIM FAKHRY, SE, MM):

Jadinya karena pemilihan beliau di Jawa saya mewakili Pak Mindo Bu. Kenapa saya Pak katakan Pak Mindo, supaya para Pemerintah melalui Ibu agak lebih segan *dikit* lah. *Gini* Bu, di Aceh Tenggara tuh ada namanya sungai Alas bu. Itu ada ikan Jurung yang sangat-sangat terkenal Bu, ikan Jurung. Itu memang sangat terkenal dan harga mungkin yang paling mahal Bu. Sekarang mau hampir punah Bu, apa salahnya di programkan agar Sungai Alas itu bisa lagi yang ada di Bahorok sekarang Bu. Cuma mutu ikan Jurung di Bahorok Sumatera Utara dengan Aceh Tenggara beda Bu, karena arus daripada sungai Alas ini arus yang deras. Yang kalau bantuan kapal apa di Aceh Aceh lain saya tidak menuntut seperti di Papua Bu *cuman* mirip-mirip saja Bu. Bak ketika Papua dan Aceh aman, aman lah Indonesia. Saya kira itu saja Pak Ketua, saya *ndak* apa, karena nanti memakan waktu sahabat saya Pak Hasanuddin Pak Ketua. Saya Pak, saya persingkat. Terima kasih

KETUA RAPAT:

Pak Hasanuddin satu menit saja.

F- PPP (DRS. H. HASANUDDIN AS, M.Si):

Baik. *Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh*

**Ketua dan anggota yang berbahagia
Ibu Menteri, Bapak-Bapak Eselon I**

Saya hanya menekankan saja, untuk kualitas ikan Pak, kualitas ikan untuk di ekspor supaya lebih dari 50% terespor kalau bisa lebih 90 atau 80% ini persoalannya dimana? Ternyata persoalannya di SDM-nya. Oleh karena itu mohon SDM supaya kawan-kawan yang sudah tamat di sekolah perikanan baik di di apa, sekolah tingginya atau di, -yang kemarin di Pariaman apa namanya Pak? politeknik ya?- Politeknik. Supaya bisa mereka setelah tamat itu ke laut dan mencontohkan kepada nelayan lain bagaimana menangkap ikan yang baik dan kualitasnya yang baik sehingga ekspornya meningkat. Itu pertama.

Yang kedua, Ibu Susi. Sama dengan di Aceh tadi, di Sumatera Barat juga ada namanya danau Singkarak. Satu-satunya ikan di dunia yang ada disana cuman Bilih dan sekarang sudah mau habis. *Alhamdulillah* Kepala Dinas Provinsi sudah mulai menata kembali. Tapi bisa gak itu di apa, coba dibudidayakan? Bisa *gak* tuh dibudidayakan supaya tidak habis *gitu*. Kalau sudah bisa *alhamdulillah* sehingga kerambah sama bagan itu hapus dari sana dan kami minta tukar dengan tangkap, alat tangkap yang lain saja supaya bisa turun temurun kembali untuk melaksanakan pekerjaan di danau Singkarak. Perikanan dari Perindo atau dari ini, mohon bantuan juga di Sumatera Barat untuk memberikan edukasi kepada nelayan di sana. Jangan tidak diambil ikannya jadi diambil ikannya kalau memang *grade*-nya rendah ya diberikan ya diajarlah mereka supaya *grade*-nya bisa tinggi karena itu warga kita juga, masyarakat kita juga. Kalau mereka aktif menangkap tetapi dibeli dengan harga yang murah karena kualitas kan rugi mereka. Itu saja Bu Menteri, saya khusus kepada ikan dan kualitasnya saja. Terima kasih. Yang lain-lain semuanya bagus kok Pak,Ibu.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam

Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak Rahmad

F- PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.PI, MM):

Baik Ibu Menteri, Pimpinan, dan teman-teman sekalian yang saya hormati.

Soal garam Bu Menteri, kalau garam kalau gak Bu Susi siapa lagi kita berharap? Kementerian Perindustrian? Jangan harap Bu. Sekarang ini beberapa waktu yang lalu saya mendapat informasi garam melimpah ruah lagi dari impor ya. Saya mengusulkan untuk program PUGAR Bu Menteri, posturnya-kan agak mengerucut lagi, berkurang (suara tidak jelas) entah salah atau benar saya hanya minta untuk diperbanyak lagi lah Bu ya. Kalau

masih kurang diperbanyak lagi lah. Tinggal bagaimana implementasinya di lapangan kalau ternyata kurang tepat sasaran saya tahu waktu saya ke NTT khusus ada membrane itu dijual gitu ya, membran dijual. Ya saya minta tolong untuk dilibatkan BUMN Garam kita Bu, biar sinergi jangan berbasiskan pada *project* tetapi bagaimana agar itu berkelanjutan.

Nah saya miris kalau mendengar garam ketika petani saya garam mereka merengek-rengok untuk dibeli garamnya itu. Coba 2016 kemarin itu diberi kekuasaan *powerfull, masyallah* itu garam di pinggir jalan-jalan *dikoretin* Bu, harganya terhormat, petani garam terhormat. Nah Ibu diberikan senjata detik-detik akhir *injury time* ini Bu, bicaralah komunikasilah dengan Kementerian Perindustrian. Bagaimana untuk penyelamatan agar gairah petambak garam kita itu tetap bergairah. Saya mengusulkan teknisnya garam kan *cuman* hanya dua, garam industri dan konsumsi. Garam industri itu kan nilainya kan 97 sekian sedangkan industri perikanan kan tidak butuh itu. *Koretan-koretan* juga bisa dipakai, di bawah 90 (suara tidak jelas) juga bisa dipakai. Ya oke lah buat kaca memang harus bagus *gitu*.

Nah saran saya selalu saya sampaikan karena saya perih betul karena begitu saya ke NTT mereka sudah begitu banyak garam, merengek-rengok kepada PT Garam untuk di jual, untuk di beli gitu loh. Sedangkan PT Garam kan tidak berkewajiban untuk membeli. Nah ini adalah kepedihan kami Bu Susi. Kalau Bu Susi merasa berat tanda petik itu kuasa saya hanya terbatas, nah petani garam kepada siapa lagi? Demo? Demo juga dibiarkan saja. Saya sedih sekali Bu. Kalau *engga* dua minggu yang lalu media, garam lagi masuk lagi. Kalau perlu Ibu Menteri, apa yang bisa diperkuat untuk PT Garam barangkali untuk meningkatkan kualitas teknologinya, berikanlah Bu beri kesempatan PT Garam. Kalau perlu kalau memungkinkan kalau memang mengharuskan itu harus mendapatkan penguatan kuasa dari Presiden oke lah, PT Garam diberi peran seperti *buffer stok*-nya Bulog. Itu barangkali dalam rangka untuk meningkatkan dan proses penyelamatan petani kita untuk tetap semangat. Nah satu-satunya jalan, klasifikasi garam itu tidak seperti industri dan industri harus ada rangkaian yang barangkali kalau industri di bawah 90 ya bolehlah.

Saya tahu suasana batin Ibu, paham sekali saya suasana batin Ibu. Tetapi kalau seandainya batin Ibu seperti itu dan perdagangan, perindustrian, syukur-syukur nanti dalam postur kabinet nanti perdagangan perindustrian itu bisa menyatu jadi lebih fleksibel gitu ya. Arahnya kan isunya begitu tapi gak tahu *wallahu 'alam*, itu kan prerogatif Presiden ya. Ya tapi tidak, tidak mengarah ke situ tapi paling tidak ketika suara batin itu bisa ditangkap Ibu, Ibu bicara kencang terhadap petani garam sama halnya kencangnya ketika menolak negatif *list* nya tetap didorong pada untuk tetap dalam negeri ini.

Bersemangatnya petani garam menolong petani garam sama halnya semangatnya Ibu ketika menjaga sumber daya dari pencoleng-pencoleng luar kapal itu. Jadi itu yang, saya tahu tetapi kepada siapa lagi kalau saya kemarin ke Ibu, Pemerintah dalam hal ini Bu Susi *gitu ya*. Karena saya khusus datang ke NTT melihat petani garam menangis kepada PT Garam untuk di beli. Nah akhirnya saya dapat cerita 2016 kemarin itu masa ke emas an garam di jalan-jalan *dikumpulin*, laku kok. Industri juga masih bisa itu, cengeng itu kalau industri garam, maksudnya saya bisa kencang itu pada Perindustrian. Bisa itu di bawah 90 95, 96 pun masih bisa diterima. Dengan terpaksa (suara tidak jelas) 2016 garam-garam jelek masih diterima industri kok. Jadi kembali lagi ke Dirjen yang membidangi pergaraman, tolong kolaborasi dalam rangka untuk tetap memberi semangat petani garam. *Matur nuwun*.

KETUA RAPAT:

Baik. Demikian masukan dari teman-teman Anggota Komisi IV. Saya ingin melengkapi satu yang tidak disebutkan dari hasil kunjungan kerja spesifik kami di Lampung Selatan kebetulan didampingi oleh Dirjen salah satu Dirjen Ibu Pak Tio bersama Dirjen Kehutanan juga kemarin hadir ke sana. Kita menengok kapal yang kemarin cukup lumayan ramai di masyarakat sana yang protes karena akan menyedot pasir laut. Secara prinsip sudah kita tangani tapi hal-hal lain yang kita temukan. Ternyata di Pulau Sebesi dari masyarakat Pulau Sebesi dan Pulau apa satunya lagi? Sebuku, itu masyarakat di situ itu belum lama kena tsunami cukup lumayan agak berpengaruh buat masyarakat ya jadi kita kemarin sudah putuskan kita akan bantu. Mohon nanti dari KKP segera kita bantu karena sesuai dengan kebutuhan yang di sana, Pak Tio saya ungkapkan dalam Raker ini supaya menjadi keputusan resmi sehingga dalam eksekusinya Dirjen sudah punya payung hukumnya. Secara prinsip kita mendukung Komisi IV untuk membantu masyarakat Pulau Sebuku eh, Pulau Sebesi dan Pulau Sebuku untuk dibantu sekaligus dalam rangka penyelesaian bencana tsunami kemarin khususnya kedua pulau itu tapi secara umum Lampung Selatan juga perlu untuk dibantu.

Demikian dari kami, kami persilakan Bu Menteri untuk menanggapi beberapa masukan tadi baru kemudian kalau sudah tidak ada lagi kita langsung kepada kesimpulan.

MENTERI KKP (Dr. (HC) SUSI PUDJIASTUTI):

Tentang permintaan Sumatera Barat Pak, kita mencoba untuk bekerja semaksimal mungkin, mungkin nanti ada *training* atau apa dari BRSDM dan dari Perinus, Perindo karena memang sekarang, dulu kan mereka tidak dapat

tuna banyak sekarang tunanya banyak ya harus dilatih itu. Jadi *bless in disguise* di satu sisi tapi memang masyarakat juga belum siap bagaimana cara menjaga tuna karena memang ikan tuna besar bulat agak susah kalau tidak cepat kena es, air dingin itu biasanya masalah. Tapi kita sudah kirim *ice flake* mungkin *training* saja cara mereka meng-*handle*.

Kemudian ikan Bilih itu memang itu sudah menjadi target kita untuk di *breeding*-kan dan dibuat bibitnya nanti kita lepas kesana. Sebetulnya kalau kembali kepada alam semua jauh lebih baik Pak, danau-danau itu. Bantuan alat tangkap nanti Dirjen Tangkap mungkin bisa konsolidasi. Saya rasa kapalnya kecil-kecil saja kan Pak. 1 GT juga jauh dari cukup, kalau 2 GT mungkin kebesaran untuk ukuran danau Pak.

Kemudian untuk garam, Bapak, bukannya saya tidak bisa tapi ya kalau dibilang saya tidak berani ya saya pikir saya tidak menandatangani Perpres ikut paraf dalam Perpres itu, dalam PP dalam Peraturan Pemerintah. Saya tidak ikut. Jadi ya sebetulnya itu juga sikap kita kan Pak. 2015 garam 2600 sampai 3000, 2015 seribu, hampir sama waktu saya masih pegang (*suara tidak jelas*) memang rekomendasi hanya 2,1 2,3 juta ton maksimum. Harga di petani memang bergerak di antara 2000 paling murah 1800 Pak. Tapi 2018 wewenang saya di cabut dengan PP tadi ya saya tidak bisa apa-apa dan impor naik menjadi 3,7 juta ton.

Dan persoalan adalah kalau PT Garam dipaksa menjadi *buffer* akan sama dengan Bulog, tampung beras tapi gak bisa jual karena pasarnya sudah penuh. Sebetulnya garam konsumsi atau industri sama tidak ada beda Pak. Itu hanya mereka saja untuk membedakan. Persoalan adalah bahwa garam impor itu lebih murah, banyak, bersih. Tapi kalau garam dari India juga tidak sebersih dan tidak sebaik garam dari Australia. Tapi kalau logistik mereka sudah kuasai Pak. Jadi kalau garam rakyat terlalu banyak, ekspor impornya terlalu banyak, garam rakyat akan jadi korban. Tata niaga tidak di bawah kita Pak, itu persoalan kita. Kalau diperbolehkan dikembalikan ke kita tanpa PP saya yakin garam akan 2000 lebih lagi, karena itu terbukti 2015, 2016, 2017 dengan kerasnya kita ya bisa dijaga harga garam. Dan ya sayang 3 tahun saja mereka menikmati, 3 tahun setengah hampir 4 tahun mereka menikmati.

Nah persoalan PT Garam nanti dipaksa nanti seperti Bulog Pak stok berasnya sampai baru habis 2 tahun kemudian. Itu kalau tidak impor, kalau tahun depannya impor lagi ya setahun lagi berasnya juga tidak bisa keluar. Ini adalah hal yang memerlukan PR di tata niaga Pak, tata niaga bukan di kami. Sedih saya juga sedih Pak dengarnya karena saya juga dengar kegembiraan mereka pada saat harga tidak pernah seumur hidup mereka garam itu di atas 1000 perak. Garam di atas 2000 perak ya di atas 1000 perak saja belum

pernah sebelumnya. Tapi 2015, 2016, 2017 sampai pertengahan 2018 harga tuh paling murah 1800, 1600 karena kita atur. Sekarang kita tidak bisa atur. Karena impor saya tidak keluarkan kuota, tidak keluarkan rekomendasi, tidak juga bisa menahan. Jadi saya tidak tahu harus bagaimana. Secara administrasi saya sudah tidak membubuhkan paraf saya dalam PP itu. Jadi kira-kira seperti itu Pak. Kalau pugar tidak ada yang berkurang, pugar tetap sama.

Kemudian untuk Aceh, kita akan lakukan Pak dan kita senang untuk memperbaiki semua ikan-ikan endemik asli dari setiap sungai maupun danau, itu yang mesti kita restorasi. Terima kasih. *Akhirukalam, Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh.*

Oh untuk Pulau itu kita sebetulnya tidak, selain program anggaran juga kita nanti bisa di-*switch* beberapa dari DJPT sama dari PDS. PDS bisa bantu *ice flake* dari DJPT bisa kapal. Kita juga ada program kok Pak yang non anggaran APBN untuk Lampung Selatan dan Pandeglang dari pribadi-pribadi kita juga ada Pak. Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Bapak Ibu sekalian

Demikian tanggapan dari Pemerintah. Kalau sudah tidak ada pendalaman lagi kita bisa saya usulkan untuk kepada kesimpulan ya. Langsung tolong ditampilkan kesimpulan.

Kesimpulan pertama, Komisi IV DPR RI menyetujui RAPBN Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 sebesar Rp 6.488.661.749.000 yang bersumber dari rupiah murni sebesar Rp 6.278.285.636.000. Badan Layanan Umum sebesar Rp 58.234.286.000, Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 112.141.827.000 dengan komposisi program per Eselon I sebagai berikut:

- a. Sekjen sebesar, Sekretariat Jenderal sebesar Rp 515.623.761.000
- b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp 85.267.955.000
- c. Dirjen Perikanan Tangkap sebesar Rp 702.462.450.000
- d. Dirjen Perikanan Budidaya sebesar Rp 739.572.614.000
- e. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 366.017.696.000
- f. Dirjen Pengelolaan Ruang Laut sebesar Rp 507.850.023.000
- g. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 1.062.575.107.000
- h. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 1.868.215.557.000, dan

- i. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sebesar Rp 601.075.586.000

Bu Menteri, ini dari angka-angkanya apakah sudah betul?

MENTERI KKP (Dr. (HC) SUSI PUDJIASTUTI):

Sudah Pak

KETUA RAPAT:

Ibu setuju dengan angka-angka ini?

MENTERI KKP (Dr. (HC) SUSI PUDJIASTUTI):

Setuju Pak

KETUA RAPAT:

Teman-teman bisa kita ambil kesimpulan kita setuju? Kesimpulan nomor 1?

(RAPAT:SETUJU)

Kesimpulan nomor 2, Komisi IV DPR RI menyetujui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 1.005.200.000.000 yang terdiri dari DAK Provinsi sebesar Rp 327.803.383.300 dan DAK Kabupaten/Kota sebesar Rp 677.396.616.700. Bu Menteri apakah angkanya sudah benar ini?

MENTERI KKP (Dr. (HC) SUSI PUDJIASTUTI):

Benar Pak, setuju.

KETUA RAPAT:

Teman-teman kita ambil persetujuan

(RAPAT:SETUJU)

Bapak Ibu sekalian

Dengan berakhirnya kesimpulan, 2 kesimpulan tadi maka berakhir sudah Rapat Kerja kita hari ini. Sebelum kami akhiri, kami tutup rapat ini, kami persilakan Ibu Menteri untuk menyampaikan kata penutupnya, kami persilakan.

MENTERI KKP (Dr. (HC) SUSI PUDJIASTUTI):

Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota Komisi IV yang saya hormati.

Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan Komisi IV DPR RI atas persetujuan-persetujuan RAPBN 2020 dan atas dukungan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan selama 5 tahun ini. Mohon maaf apabila dalam membangun komunikasi dan koordinasi terdapat hal-hal yang kurang berkenan, hal tersebut semata-mata karena kami ingin memberikan yang terbaik bagi semua program-program pembangunan Pemerintah dalam mewujudkan laut sebagai masa depan bangsa. Semoga bila masih ada kesempatan kita bertemu di masa yang akan datang. Sekali lagi terima kasih. *Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh.*

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Ibu Menteri dan jajaran, kami juga akan menyampaikan juga permohonan maaf dari kami Pimpinan dan teman-teman anggota Komisi IV DPR RI selama 5 tahun kerja sama kita mungkin terjadi debat yang berkepanjangan, terjadi perbedaan pendapat. Tapi itu semua semata-mata karena kita ingin kelautan KKP menjadi yang terdepan dalam mengelola laut khususnya di sektor sumber daya manusia dan sektor sumber daya perikanannya. Kami yakin apa yang kami lakukan adalah untuk kepentingan kita semua. Kami mohon maaf, saya yakin hari ini adalah Rapat Kerja terakhir periode ini. Ini terakhir Pak, Rapat Kerja terakhir kecuali Ibu Menteri besok akan hadir di Paripurna dalam rangka pengesahan pembahasan Undang-Undang Karantina. Sedang menunggu jadwal karena Undang-Undang Karantina akan diundang Menteri-Menteri yang terkait di Paripurna. Jadi Rapat Kerja di Komisi IV di KKP dengan Komisi IV ini yang terakhir kelihatannya. Ya kami tetap berharap periode berikutnya kita masih terus bertemu, bertemu dalam suasana yang berbeda dan semangat yang sama.

Ya Bu Menteri kami juga sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata atau yang kurang berkenan secara prinsip kita sama dalam membangun negeri ini. Dengan mengucap *alhamdulillah* Rapat Kerja kita akhiri.

Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, *om santi santi santi om, namo buddhaya.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 18.00)

Jakarta, 16 September 2019
An. Ketua Rapat,
Sekretaris Rapat

ttd

Drs. Budi Kuntaryo
NIP. 196301221991031001